

**AKIBAT HUKUM KODIFIKASI TOTAL PADA
KEBERADAAN UNDANG-UNDANG PIDANA AKHUSUS
(Kajian Terhadap Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas
Dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA



Disusun Oleh :

Izzudin Arsalan

2013-20-092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2017

HALAMAN PEGESAHAN
AKIBAT HUKUM KODIFIKASI TOTAL PADA KEBERADAAN
UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS
(Kajian terhadap Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi)
SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas
dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (SI)
Ilmu Hukum dengan Kekhususan
Hukum Pidana


Oleh :

IZZUDIN ARSALAN

2013-20-092

Kudus, juli 2017

Disetujui:
Pembimbing I,


Dr. Hidayatullah SH, M.H

Pembimbing II


Iskandar Wibawa, SH, M.H

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum UMK


Dr. Sukresno SH, M.Hum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIATISME

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Izzudin Arsalan

Nim : 2013-20-092

Alamat Duku : Ngarengan, Desa Puncel Rt 03 RW 07, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati

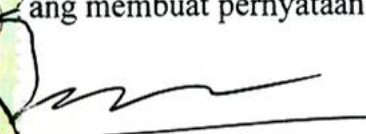
Judul Skripsi : Akibat Hukum Kodifikasi Total Pada Keberadaan Undang Undang Pidana Khusus (Kajian Terhadap Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, Juli 2017

Yang membuat pernyataan


IZZUDIN ARSALAN



MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

Moto :

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan .” (Qs Al- insiroh: ayat 5)

Kupersembahkan Untuk :

1. Kedua orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya.
2. Semua keluarga saya yang telah mendukung.
3. Dosen-dosen yang telah membimbing saya dalam perkuliahan.
4. Pembimbing debat saya.
5. Tim debat saya.
6. Sahabat-sahabat saya dan teman-teman lainnya di Fakultas Hukum yang telah membantu dan mendukungku selama ini.
7. Pengurus Bem Fakultas Hukum masa bakti 2015/ 2016.
8. Universitas Muria Kudus.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugraahkan rahmat, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Akibat Hukum Kodifikasi Total Pada Keberadaan Undang-Undang Pidana Khusus (Kajian Terhadap Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi)”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam hal sumbangsih pemikiran maupun masukan serta saran untuk menjadikan skripsi ini sebagai suatu karya ilmiah yang mudah-mudahan dapat bermanfaat, maka untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Suparno, SH.MS selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, SH, Mhum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Hidayatullah SH,MH selaku Dosen pembimbing I. Yang tidak pernah letih dalam membimbing dan memberikan masukan-masukan kepada saya sampai akhir skripsi ini tersusun.
4. Bapak Iskandar Wibawa SH,MH selaku dosen pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberi bimbingan, arahan, dan dorongan sampai ahir skripsi ini tersusun.
5. Ibu Wiwit ariani, SH.Hum selaku dosen wali yang senantiasa selama ini memberi saya motivasi dan nasehat.
6. Bapak Sumono SH. MH selaku Dosen Pembimbing debat, yang selama ini membimbing saya dan menjadikan saya mampu berbicara didepan umum tanpa mengalami rasa grogi.
7. Bapak Suyoto SH. MH selakau Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang selama ini membimbing dan

mengarahkan saya dalam berorganisasi di BEM Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

8. Kepada beliau Dr. KMRT Noor Nasroh Mangkunegoro, yang selama ini telah membimbing dan memberikan arahan kepadaku dalam menuntut ilmu.
9. Kepada Naila Syifa yang selama ini memberikan semangat dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
11. Rekan-Rekan Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus angkatan 2013 yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu namanya, yang telah membantu dan mendorong untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Rekan-Rekan Mahupa talaseta yang selama ini menjadi teman satu perjuangan dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
13. Seluruh pengurus Bem Fakultas Hukum masa Bakti 2015/2016 yang telah berjuang bersama-sama untuk memajukan Bem Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, sekian yang dapat saya sampaikan.

Kudus, Juli 2017

Penulis



Izzudin Arsalan

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “**Akibat Hukum Kodifikasi Total Pada Keberadaan Undang-Undang Pidana Khusus (Kajian Terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)**” ini, secara umum bertujuan menjelaskan transformasi delik Tindak Pidana Korupsi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta akibat hukum dari adanya kodifikasi tersebut bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian yuridis normatif tersebut penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis, kemudian dianalisa sehingga diperoleh dan didapati kejelasan dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa transformasi delik Tindak Pidana Korupsi dari Undang-Undang Tipikor ke dalam RUU KUHP 2015 hanya memasukkan hukum materil, adapun hukum formilnya masih tetap diatur dalam Undang-Undang Tipikor dan tidak dimasukkan ke dalam RUU KUHP 2015. Ketentuan pengaturan mengenai hukum acara dalam menangani Tindak pidana Korupsi masih diatur dalam ketentuan Undang-Undang khusus di luar KUHP. Selain ketentuan tersebut dalam pejatuhan sanksi pidana bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi ancaman sanksi denda terdapat perbedaan, jika dalam Undang-Undang Tipikor pidana denda diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu denda minimum dan maksimum, namun dalam RUU KUHP 2015 denda diklasifikasikan ke dalam VI kategori. Disisi lain untuk pidana denda bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi diancam dengan denda pada golongan II dan IV, Sementara untuk definisi korupsi itu sendiri dalam RUU KUHP 2015 definisinya sama dengan pengertian korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor.

Adapun pengaturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi eksistensinya masih tetap diakui dan kewenangannya tidak didegradasi akibat kodifikasi tersebut, Pasal 780 RUU KUHP 2015 dapat menjembatani dalam mendefinisikan pengertian korupsi dan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK, selain adanya Pasal 780 RUU KUHP pada Pasal 781 ayat (1) RUU KUHP menyatakan hukum acara pidana yang menyimpang dari KUHP, yang diatur dalam Undang-Undang khusus dinyatakan masih tetap berlaku eksistensinya.

Kata Kunci : Kodifikasi, RUU KUHP 2015, Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PEGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Pembatasan Masalah	13
C. Perumusan Masalah	14
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Kejahatan	18
2. KUHP	20
a. Pengertian KUHP	20
b. Sejarah KUHP	20
c. Sistematika KUHP	22
3. Hukum Pidana Khusus	25
a. Pengertian Hukum Pidana Khusus	25
b. Kekhususan Hukum Pidana Khusus	26
4. Tindak Pidana Korupsi	28

a. Definisi Tindak Pidana Korupsi	28
b. Definisi Korupsi Menurut Undang-undang dan Ancaman sanksing.....	29
c. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi	33
5. Harmonisasi Hukum	35
6. Kodifikasi	38
a. Pengertian Kodifikasi	38
b. Sejarah Kodifikasi	40
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Metode Pendekatan	44
2. Metode Pengolahan Data	45
3. Mengapa Menggunakan Yuridis Normatif	46
4. Metode pengumpulan data dokumen dan Studi Kepustakaan	48
5. Metode Penyajian Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Praktik Transformasi Subtansi Undnag-Undang Tindak Pidana Korupsi Buku Kedua RUU KUHP 2015	52
B. Konsekuensi hukum kodifikasi total dalam Rancangan Undang-Undang KUHP pada keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	63
a. Kekhususan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dibanding KUHP	64

b. Perumusan Tindak Pidana Korupsi yang masuk ke dalam RUU KUHP 2015 mengenai Pengertian Korupsi dan Penjatuhan Sanksi pidana	66
c. Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Paska Masuknya Tindak Pidana Korupsi ke dalam RUU KUHP 2015	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
Daftar Pustaka	82